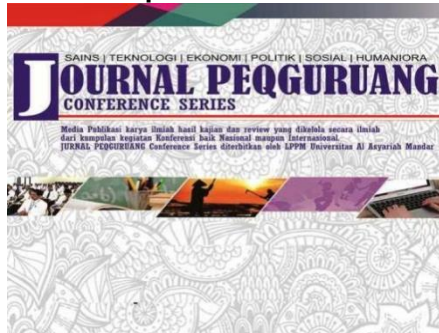


Graphical abstract



ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN POLEWALI MANDAR

¹Maarifah Dahlan, ² Ahmad Al Yakin, ³Jumriana Angraeni Pajammari

*Corresponding author

maarifahdahlan12@gmail.com

Abstract

In Polewali Mandar Regency, waste is also a very troubling problem, population growth and changes in people's consumption patterns have an impact on increasing the volume, type and characteristics of increasingly diverse waste. The purpose of this study was to determine the waste management policy at the Polewali Mandar Regency Environmental Service. This type of research is a qualitative descriptive research. Source of data consists of primary and secondary data. The instruments used are cameras, smartphones for recorders, pencils, ballpoint pens, notebooks. and the informants in this study were key informants, namely the head of the waste management section and the usual informants were the heads of the DLHK section and several staff in the cleaning sector. DLHK plays an active role in waste management and waste management and there are several programs being carried out such as environmental activities, namely Clean Friday and Clean Action. Based on the results of this study, it shows that DLHK has implemented a waste management policy based on Regional Regulation Number 04 of 2018 by providing TPS in various areas in Polewali Regency The conclusion of this study is the Policy Analysis of the Environmental Service. Has followed regional regulation number 04 of 2018 optimally DLHK waste management has been carried out optimally to carry out management by providing TPS in various areas in Polewali Mandar Regency

Keywords: Policy, Garbage, DLHK, Polewali Mandar

Abstrak

Di Kabupaten Polewali Mandar, sampah juga menjadi masalah yang sangat meresahkan, pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat berdampak pada peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Alat yang digunakan adalah kamera, smartphone untuk perekam, pensil, pulpen, buku catatan. dan informan dalam penelitian ini adalah key informan yaitu kepala seksi pengelolaan sampah dan informan biasa adalah kepala seksi DLHK dan beberapa staf di bidang kebersihan. DLHK berperan aktif dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah dan ada beberapa program yang dilakukan seperti kegiatan lingkungan yaitu Jumat Bersih dan Aksi Bersih. Berdasarkan hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa DLHK telah menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 dengan menyediakan TPS di berbagai wilayah di Kabupaten Polewali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Analisis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup. Telah mengikuti Perda nomor 04 Tahun 2018 secara optimal Pengelolaan sampah DLHK telah dilakukan secara maksimal untuk melakukan pengelolaan dengan menyediakan TPS di berbagai wilayah di Kabupaten Polewali Mandar

Kata kunci: Kebijakan, Sampah, DLHK, Polewali Mandar

Article history

DOI: [10.35329/jp.v6i1.4753](https://doi.org/10.35329/jp.v6i1.4753)

Received : 18/08/2023 | Received in revised form : 18/08/2023 | Accepted : 22/05/2024

1. PENDAHULUAN

Menurut WHO, limbah adalah segala sesuatu yang tidak digunakan, tidak digunakan, tidak disukai atau dibuang, yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan tidak tercipta. (Muliadi dkk.,2022). Sampah adalah limbah yang dihasilkan selama proses produksi, baik industri maupun domestik. Kepadatan penduduk negara kesatuan Republik Indonesia memberikan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan yaitu meningkatnya jumlah sampah di Indonesia, khususnya sampah plastik yang merupakan jenis sampah yang mudah terurai.. (Asriyanti, 2018)

Istilah sampah yang ada didalam pikiran kita pasti merupakan setumpuk kotoran baik berupa kertas, plastik dan barang lainnya yang menimbulkan bau sangat menyengat ataubau tidak enak. (Kaliansyah, 2021) Hingga saat ini limbah masih menjadi masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mengandung berbagai mikroorganisme patogen seperti diare, cacing dan lain-lain. Sampah di Indonesia mencapai 34 juta USD/ton dan sumber sampahnya adalah 48% sampah domestik, 24% pasar tradisional, 9% area komersial, 4% sekolah, 6% perkantoran, 7,5% jalan dan 2,4% lainnya (Elamin, 2018). Salah satu realita di Indonesia saat ini adalah adanya tanda-tanda bahwa moralitas bangsa sedang mengalami kemerosotan yang serius (Yakin, 2014). Permasalahan sampah di Indonesia disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah, perilaku masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembuangan sampah. (Cerya, 2021)

Permasalahan sampah meliputi 3 bagian yaitu hilir, proses, hulu. Di sisi hilir, jumlah sampah yang harus diolah terus meningkat. Di sisi proses, baik pemerintah kota maupun pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas. Bagian hulu merupakan sistem yang kurang optimal diterapkan untuk finishing. Kebanyakan orang menganggap membakar sampah sebagai bagian dari pengelolaan sampah. Tetapi hal-hal seperti itu mencemari lingkungan dan dapat mempengaruhi kesehatan. Misalnya, limbah yang bersentuhan dengan virus corona, khususnya limbah medis, tergolong limbah berbahaya. (Maarifah Dahlan, 2022). Sikap seperti ini ada kemungkinan dipengaruhi oleh pengetahuan dan kematangan usia (Elamin, M. Z., Ilimi, K. N., Tahrirah, T., Zarnuzi, Y. A., Suci, Y. C., Rahmawati, D. R., & Nasifa, I. F. , 2018)

Dinas Lingkungan Hidup Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan airlimbah serta bidang kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup

dipimpin oleh Kepala Pelaporan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Di Kabupaten Polewali Mandar sampah juga menjadi persoalan yang sangat meresahkan, penambahan penduduk dan berubahnya pola konsumsi masyarakat menimbulkan pengaruh pada bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam. Sehingga dalam perwujudan pengelolaan, Pemerintah Kota Polewali Mandar telah memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kota Polewali Mandar menerbitkan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Jumlah timbulan sampah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 mencapai 69.865,96 ton/ tahun. Jumlah sampah yang dikelola melalui upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah sebesar 39.239,49 ton/ tahun atau sebesar 56,16%. Ratusan sampah itu berasal dari sampah rumah tangga maupun dari sampah pasar, yang terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas munculah sebuah pertanyaan apakah kebijakan pengelolaan sampah yang sudah dibuat benar-benar mengarah pada pemecahan masalah.

Pengelolaan persampahan tidak hanya memerlukan keterlibatan masyarakat tetapi juga aspek regulasi yang menjadi dasar hukumnya yaitu Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 Pasal 16 tentang pengelolaan persampahan termasuk aspek klasifikasi. Kelima aspek tersebut dalam satu system Pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti agar dapat mengenali dan mencari sejauh mana masalah yang terjadi dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat menghadirkan solusi terkait permasalahan tersebut. Serta juga dapat melihat sejauh mana pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah yang dirancang pemerintah terhadap pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup” yang berlokasi di DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Kabupaten Polewali Mandar.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam peneliti yaitu metode deskriptif kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran yang lengkap mengenai hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian (Sugiyono, 2015). Lokasi penelitian ini yaitu di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada

bulan Maret hingga April. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara secara mendalam. Menurut (Sugiyono, 2017), teknik pengumpulan merupakan data yang dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara di DLHK didapatkan bahwa Kebijakan Pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik, didapatkan bahwa beberapa informan mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menjalankan Kebijakan Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018. Berikut salah satu penuturan informan :

Kebijakan Pengelolaan Sampah sudah cukup terlaksana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018.
(MH, 46 Tahun)

Pernyataan informan di atas didukung oleh beberapa informan lainnya terkait kebijakan diantaranya sebagai berikut:

Kebijakan Pengelolaan Sampah di DLHK sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan mengikuti perda yang ada.
(MS, 50 Tahun)

Dengan keterangan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa DLHK telah mengikuti peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah kabupaten Polewali Mandar.

2. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di DLHK, diketahui bahwa DLHK tidak hanya berperan aktif dalam pengelolaan dan pengolahan sampah, tetapi juga dalam beberapa kegiatan lingkungan seperti Jumat Bersih dan Aksi Bersih. Salah satu informannya adalah:

Program lingkungan bersih DLHK adalah kegiatan Jumat Bersih, DLHK berperan aktif dalam pengelolaan dan pencegahan sampah.
(MH, 46)

Pernyataan pelapor di atas didukung oleh beberapa pelapor lainnya terkait pengelolaan sampah, antara lain:

DLHK berperan aktif dalam pengelolaan sampah dan sebagai bagian dari program DLHK Clean Environment Active, inisiatif Clean Friday mengedukasi masyarakat tentang cara membuang sampah dan limbah rumah tangga.

(MS, usia 50)

Dari beberapa informasi yang disampaikan informan di atas, DLHK berperan aktif dalam pengelolaan sampah, telah melaksanakan beberapa program lingkungan bersih seperti Jumat Bersih dan Aksi Bersih, dan dapat disimpulkan bahwa kami mengedukasi masyarakat umum.

3. Faktor Penghambat Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di DLHK didapatkan bahwa faktor penghambat pengelolaan sampah yang ada di Daerah Kabupaten Polewali Mandar salah satunya factor TPA yang belum ada. Berikut salah satu penuturan informan :

Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah yang ada di Daerah Kab.Polewali Mandar karena pada saat ini belum memiliki TPA yang dapat beroperasi semaksimal mungkin. (MH, 36 Tahun)

Pernyataan informan diatas didukung oleh beberapa informan lainnya terkait factor penghambat dalam pengelolaan sampah diantaranya sebagai berikut :

Salah satu factor yang menghambat DLHK dalam pengelolaan sampah karena TPA yang ada di Daerah belum dapat beroperasi dengan baik. (MS, 50 Tahun)

Dengan beberapa keterangan informan diatas dapat disimpulkan bahwa Faktor Faktor yang menghambat DLHK dalam pengelolaan sampah salah satunya adalah belum adanya TPA yang dapat beroperasi dalam pengelolaan sampah

B. Pembahasan

1. Analisis Kebijakan

Dalam menganalisis kebijakan pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar, yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui apakah kebijakan pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar sudah berjalan dengan baik berdasarkan implementasi Perda No. 04. Hal ini terkait dengan sesuatu hal. . Pengelolaan sampah 2018 dengan kemampuan pemantauan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar memperhatikan pelaksanaan Perda No. 04 Tahun 2018 dan berupaya untuk memastikan realisasi yang tepat dari tujuan yang terkandung di dalamnya. Para peneliti mengatakan, berdasarkan temuan mereka, kebijakan pengelolaan sampah Departemen Lingkungan Hidup berjalan sangat baik dengan mematuhi peraturan daerah yang ada. Upaya jasa lingkungan dimaksimalkan. B. Ketika sampah ditangani melalui kegiatan seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Mereka memberikan informasi tentang pemilahan sampah yang tepat, penggunaan plastik alternatif, manfaat daur ulang, dan praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Hal itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yang artinya Pemerintah berwenang menetapkan Kebijakan Lokasi TPS

TPST.TPA. Misalnya, DLHK menyediakan TPS dan TPST di berbagai wilayah di Kabupaten Polewari Mandar sesuai Perda No. 04 Tahun 2018. Sedangkan untuk TPA yang belum berfungsi maksimal, DLHK membuang sampahnya ke TPA sementara di Kabupaten Binuan..

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih di area manapun. Manajemen juga dapat diartikan melakukan sesuatu agar lebih tanggap dan lebih bermanfaat. Karena manajemen sama dengan manajemen, manajemen dipahami sebagai proses menggunakan ilmu dan seni untuk membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen yang baik adalah dasar untuk pengembangan organisasi apapun, baik itu instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja atau bisnis lainnya. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Polewari Mandar masih berperan aktif dalam pengelolaan dan pengendalian sampah. Jumlah sampah per hari sekitar 40 ton per hari dan 14.600 ton per tahun. Program Lingkungan Bersih Departemen Lingkungan Hidup mencakup berbagai kegiatan dan inisiatif untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi populasi. Di bawah ini adalah beberapa contoh program lingkungan bersih aktif yang biasa dijalankan :

- a. penyusunan kebijakan
- b. pendidikan dan sosialisasi
- c. pengawasan dan penegakan hukum
- d. pengembangan infrastruktur
- e. kolaborasi dan koordinasi
- f. monitoring dan evaluasi

dari hasil wawancara dengan beberapa whistleblower DLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat aktif dalam pengelolaan sampah, dan DLHK berkomitmen dalam pengelolaan sampah dengan tetap berpegang pada pedoman pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah seperti: Dikatakan dikelola . B. Pembuangan sampah meliputi kegiatan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Salah satunya adalah pengangkutan sampah kota setiap hari dan penyediaan TPS di beberapa wilayah Kabupaten Polewari Mandar. Kini DLHK juga menyediakan tempat sampah dimana masyarakat dapat menukarkan sampahnya dengan makanan, uang, token listrik dan lain-lain. DLHK memiliki beberapa program untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi polusi. Salah satunya mengedukasi masyarakat tentang pemilahan dan pengelolaan sampah rumah tangga, melakukan aksi bersih di berbagai lokasi, serta menciptakan semangat gotong royong di masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta mengubah limbah menjadi sumber daya, seperti yang dituangkan dalam peraturan daerah.

3. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Sampah

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah sampah (Puspa, L., & Darmi, T. , 2021)

- a. Ukuran populasi bergantung pada aktivitas dan kepadatan populasi. Populasi yang lebih padat memiliki lebih sedikit ruang atau ruang untuk menampung sampah, dan lebih banyak sampah yang menumpuk. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat maka semakin banyak pula dihasilkan limbah dalam kegiatan pembangunan, perdagangan, industri, dan lain-lain.
- b. Ada sistem pengumpulan atau pembuangan limbah. Pengumpulan sampah dengan gerobak lebih lambat daripada truk, dan gerobak membawa lebih sedikit sampah daripada truk yang dapat mengangkut lebih banyak sampah.
- c. Pemanfaatan kembali material dalam bentuk limbah untuk digunakan kembali Cara ini dilakukan karena material tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi kelompok tertentu. Frekuensi pengumpulan tergantung pada keadaan. Semakin tinggi harganya, semakin sedikit limbah yang tersisa.
- d. Faktor Geografis Letak TPA (pegunungan, pesisir, dataran rendah, dll). Jika lokasi timbulan sampah berada di gunung, akses untuk mengangkut sampah ke lokasi timbulan sampah menjadi semakin sulit.
- e. Faktor Waktu Bervariasi menurut faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah sampah per hari bervariasi tergantung pada waktu hari. Misalnya, jumlah sampah pada siang hari lebih tinggi dibandingkan pada pagi hari, tetapi di pedesaan aktivitas perkotaan mengkonsumsi produk penghasil sampah dengan proporsi yang lebih besar, sehingga sampah kurang bergantung pada faktor waktu.
- f. Faktor Musiman: Selama musim hujan, parit pintu air dan filter limbah dapat tersumbat oleh kotoran. Misalnya, di pemandian yang dekat dengan area perairan atau selokan, meskipun hujan, selokan akan tersumbat oleh sampah dan air akan meluap.
- g. Kebiasaan masyarakat, misalnya ketika seseorang lebih suka makan jenis makanan atau tumbuhan tertentu, sisa makanan meningkat.
- h. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan jumlah sampah. Contohnya termasuk plastik, kardus, sisa AC, televisi dan lemari es.

Salah satu kendala pengelolaan persampahan saat ini adalah TPA yang tidak berfungsi dengan baik dan DLHK kewalahan dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten Polewari Mandar. Namun, saat ini DLHK menggelar TPS di berbagai wilayah, termasuk Desa Manmi. Ini adalah salah satu langkah awal agar sampah yang dihasilkan masyarakat tidak berserakan di mana-mana. Solusi

lain yang digunakan DLHK untuk mencegah penumpukan sampah masyarakat. DLHK membuat Program Polman Zero Garbage dengan menyediakan tempat sampah bagi masyarakat yang ingin memilah sampahnya dan menukarkannya di Bank TPA Sipamandak. Hubungi petugas tempat sampah DLHK dan mereka akan mengambil sampah yang Anda inginkan. bertukar secara langsung

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengupayakan seoptimal mungkin untuk melakukan pengelolaan. Sehingga adapun kebijakan yang diambil ialah berkaitan dengan menyediakan TPS di beberapa Lokasi yang ada di Kecamatan Polewali. Dimana sampah-sampah ini akan dijemput secara berkala oleh DLHK kemudian akan dibawa ke Pembuangan akhir

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, maka saran penulis adalah :

- a. Sebaiknya DLHK segera mengeporasikan kembali TPA yang ada di Daerah agar tidak terjadi lagi pertumpukan sampah.
- b. Bagi Masyarakat yang ada di Polewali Mandar sebaiknya menjadi nasabah bank sampah di wilayah masing-masing.
- c. Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti lebih jauh dan mengembangkan variabel lain selain variabel yang ada dipenelitian ini.
- d. Bagi Universitas dapat menjadikan bahan referensi untuk dikembangkan dalam tridharma perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriyanti, P. (2018). Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi : Universitas Islam Sunan Kalijaga*.
- Cerya, E. (2021). Strategi Komunikasi Lingkungan dalam Membangun Kepedulian Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 136.
- Elamin, M. Z. (2018). Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Kesehata Lingkungan*, 368-375.
- Elamin, M. Z., Ilmi, K. N., Tahrirah, T., Zarnuzi, Y. A., Suci, Y. C., Rahmawati, D. R., & Nasifa, I. F. . (2018). Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 370.
- Kaliansyah, M. (2021). *30 Tahun Menekuni Pengendalian Pencemaran* . Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan usakan.
- Maarifah Dahlan, S. S. (2022). Manajemen Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali di Masa Pandemi Covid-19. *Jl-KES (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 28.
- Puspa, L., & Darmi, T. . (2021). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup. *JOPPAS : Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 44-45.
- Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Polewali Mandar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Yakin, A. A. (2014). DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP ANAK (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa). *Pepatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, 3.